

BAB III

BIOGRAFI SOSIAL NUR SYAM DAN PEMIKIRANNYA

A. Biografi Nur Syam

2. Riwayat Pendidikan

Prof. Dr. Nur Syam, M. Si., dilahirkan di sebuah dusun keci di desa Sembungrejo, Merakurak, Tuban pada 7 Agustus 1958. Dirinya adalah putra tunggal dari pasangan Sabar dan Turmiatun.⁷⁴

Pendidikan dasarnya ditempuhnya di desa kelahirannya, SDN Sembungrejo, Merakurak, Tuban tahun 1971. Kemudian masuk Sekolah Menengah Ekonomi Pertama Negeri (SMEPN) Tuban, selesai di tahun 1974. Karena dorongan kakeknya, ia akhirnya masuk ke Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) 4 Tahun Tuban, berhasil diselesaikannya pada tahun 1975. Selepas PGAN 4 tahun, ia masuk PGAN 6 tahun dan selesai pada 1977. Setelah itu ia melanjutkan ke Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel Surabaya untuk menamatkan program sarjana muda (BA) tahun 1982 dan memperoleh gelar sarjana ilmu dakwah tahun 1985.⁷⁵ Selanjutnya program S2 dan S3 nya ditempuh di universitas yang sama yakni, tahun 1997 menyelesaikan program Magister Ilmu Sosial di Universitas Arilangga dan menyelesaikan program doktor (S3) tahun

⁷⁴Nur Syam, *Bukan Dunia Berbeda; Sosiologi Komunitas Islam*, (Surabaya : Jenggala Pustaka Utama, 2004), 216.

⁷⁵ Nur Syam, *Islam Pesisir*, (LKiS : Yogyakarta, 2005), 323.

2003 di Universitas Airlangga. Tepat pada 01 Oktober 2005 dirinya dikukuhkan sebagai Guru Besar di bidang sosiologi agama. Selain itu pada tahun 2006 dirinya juga berkesempatan untuk mengikuti University Management Workshop di McGill University, Montreal, Canada.⁷⁶

Pada saat menjadi mahasiswa, ia aktif di organisasi kemahasiswaan (pernah menjabat sekretaris) Badan Pelaksana Kegiatan Mahasiswa (BPKM) IAIN Sunan Ampel. Selain itu ia juga aktif di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), dan pernah menjadi ketua PMII Rayon Dakwah dan fungsionaris pengurus PMII Cabang Surabaya.⁷⁷

Dibalik karismanya sebagai seorang Guru Besar sekaligus Dirjen Pendidikan Islam, Nur Syam memiliki kisah masa Kanak-kanaknya kerap kali diliputi rasa sepi yang mengiris. Tetapi rasa sepiya tersebut diusirnya dengan membaca buku-buku kisah pewayangan. Rasa sepi itu kian terasa menjarah, ketika dirinya menginjak kelas II SMEP di Tahun 1973, karena tepat saat itulah ayahandanya berpulang ke *Rahmatullah*. Saat-saat sakral yang tidak pernah dilupakannya adalah beberapa jam menjelang ayahandanya wafat. Sambil menahan rasa sakit, ayahnya berpesan bahwa agar dirinya agar terus melanjutkan sekolah sampai tinggi, karena ayahnya hanya ingin melihat dirinya menjadi orang pandai. Nasehat itulah yang menjadi inspirasi luar biasa dan penguat jiwa bagi

⁷⁶ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=6522#.Uw6tqBecXp8>, diunduh pada 27 Februari 2014, pada 10:17.

⁷⁷ Nur Syam, *Tantangan...*, 261.

Nur Syam untuk terus sekolah hingga menjadi seorang Guru Besar seperti sekarang ini.⁷⁸

Jarak tempuh antara rumah dengan sekolahnya kurang lebih 15 Km ditempuhnya dengan mengayuh sepeda, bahkan dirinya pernah terjatuh dari sepeda sampai dua kali hingga patah tulang. Kejadian tersebut tidak mengurungkan niatnya untuk terus bersekolah. Setiap hari dirinya berangkat pukul 05:00 pagi dan pulang ketika hari menjelang petang.

Jika malam telah tiba hampir seluruh waktunya dihabiskan di surau depan rumah milik kakeknya. Di surau itulah satu-satunya tempat hiburan bagi Nur Syam kecil.

Ketika dirinya telah beranjak dewasa, dikenal sebagai aktivis kampus, namun rasa sepi itupun masih saja seringkali hadir menghampirinya. Awal-awal di rumah kos, rasa sepi itu kembali menghujam, maka diisilah malam-malamnya dengan membaca buku-buku tebal, novel-novel sastra, cerita pendek, dan yang paling ia gemari adalah karya-karya Hamka. Hobi membacanya itu telah menjadi penolong bagi dirinya saat setiap kali rasa sepi datang kepadanya.

Rasa sepi yang sekian lama menyiksanya sirna ketika dirinya memperistri Hj. Annisah Sukindah. Dari perkawinan tersebut dikaruniai tiga putri. Putri pertamanya Dhuhratul Rizqiyah lahir 15 Agustus 1986,

⁷⁸ <http://zulfanioey.blogspot.com/2011/07/prof-dr-h-nur-syam-msi.html>, diunduh pada 27 Februari 2014, pada 10:11.

putri kedua dan ketinganya kembar, keduanya adalah Shiefta Nur Azizah dan Shiefti Nur Halimah lahir pada 11 September 1988.

3. Riwayat Akademik

Bagi Nur Syam berkiprah di dunia pendidikan utamanya di lingkungan perguruan tinggi, bukan barang baru, karena sebelum menjabat sebagai rektor IAIN Sunan Ampel Surabaya, sejak tahun 1988, beliau telah menggeluti dunia pendidikan tinggi di lingkungan IAIN Sunan Ampel Surabaya sebagai asisten ahli madya hingga menjadi guru besar pada tahun 2005.⁷⁹

Awalnya pada tahun 1988, dirinya diminta untuk menjadi asisten Prof. Dr. Bisri Afandi, yang saat itu menjabat sebagai Purek I.⁸⁰ Jabatan strukturalnya dimulai tahun 1989 sebagai Plh Ketua Jurusan Penerangan dan penyiaran Agama Islam Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, tahun 1991 Ketua Laboratorium Dakwah pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, tahun 1996 Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam (PMI) pada Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel, tahun 2001 Sekretaris Kopertais Wilayah IV (Jawa Timur, Bali, NTB, NTT), tahun 2005 Pembantu Rektor (II) Bidang Akademik, Keuangan & Perencanaan, dan

⁷⁹ <http://www.kemenag.go.id/index.php?a=berita&id=86661>, diunduh pada 27 Februari 2014, pada 10:39.

⁸⁰ <http://zulfanioey.blogspot.com/2011/07/prof-dr-h-nur-syam-msi.html>. diunduh pada 27 Februari 2014, pada 10:39

tahun 2009 dirinya diangkat menjabat sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel.⁸¹

Tidak sampai habis masa jabatannya sebagai Rektor IAIN Sunan Ampel, pada tahun 2012 dirinya diangkat oleh Kementerian Agama untuk menjabat sebagai Direktorat Jendral Pendidikan Islam atau yang biasa disebut dengan Dirjen Pendis, menggantikan Prof. Dr. Mohammad Ali hingga saat ini.

Secara lebih rinci, dalam website pribadi miliknya, dirinya menambahkan tentang riwayat jabatan fungsional yang telah ditempuhnya. Dimulai pada tahun 1988 sebagai asisten ahli madya golongan III/a, tahun 1991 sebagai asisten ahli golongan III/b, tahun 1994 sebagai Lektor Muda golongan III/c, tahun 1997 sebagai Lektor Madya golongan III/d, tahun 1999 sebagai Lektor golongan IV/a, tahun 2001 sebagai Impassing Lektor Kepala golongan IV/a, tahun 2003 sebagai Lektor Kepala golongan IV/b, dan pada tahun 2005 sebagai Guru Besar Madya golongan IV/b.⁸²

Selain menjadi dosen di Fakultas Dakwah IAIN Sunan Ampel dan sebelum dirinya menjabat sebagai Dirjen Pendis, dirinya juga mengajar di Program Pascasarjana Institut Agama Islam Ibrahimy Sukorejo, IAI Tribakti Kediri, PPs STAIN Tulungagung dan PPs Universitas Pesantren

⁸¹ <http://pendis.kemenag.go.id/index.php?a=detilberita&id=6522#>. Uw6tqBecXp8 diunduh pada 27 Februari 2014, pada 10:39

⁸² http://nursyam.uinsby.ac.id/?page_id=19. Diunduh pada 27 Februari, pada 10:33.

Tinggi Darul Ulum Jombang, dan aktif di Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) La-Sains dan Tim Ahli Lembaga Pengabdian Masyarakat (LPM) IAIN Sunan Ampel.⁸³

B. Karya-Karya Nur Syam

Disamping kesibukannya yang padat dirinya juga aktif melakukan penelitian ilmiah dan menulis karya-karya ilmiah baik yang tercetak sebagai buku maupun yang tersebar dalam media cetak baik lokal maupun nasional diantaranya; *Metodologi Penelitian Dakwah* (Penerbit Ramadlani, Solo,1990); *Metodologi Penelitian Perspektif Mikro*, (Penerbit Media Insan Cendekia, 2003); *Institusi Sosial di Tengah Perubahan: Esai Pendidikan dan Sosial* (Penerbit Jenggala Pustaka Utama, 2003); *Pembangkangan Kaum Tarekat* (Penerbit LEPKISS 2004); *Bukan Dunia Berbeda; Sosiologi Komunitas Islam* (Penerbit Eureka, 2005); *Islam Pesisir* (Penerbit LKiS, 2005); *Madzab-Madzab Antropologi* (LKIS, 2006) dan masih banyak lagi.⁸⁴

C. Pemikiran Nur Syam tentang Multikulturalisme

Nur Syam adalah tokoh nasional yang aktif menyuarakan masalah-masalah sosial dan keagamaan dengan gaya pemikirannya yang *humanis*. Terkait dengan kondisi masyarakat Indonesia yang majemuk, Nur Syam menyadari bahwa Indonesia merupakan negara yang plural dan juga multikultural.

⁸³ Nur Syam, *Tantangan...*, 263.

⁸⁴ http://nursyam.uinsby.ac.id/?page_id=19.

Multikulturalisme adalah seperangkat ide atau gagasan yang menghasilkan aliran yang berpandangan bahwa terdapat variasi budaya di dalam kehidupan masyarakat. Yang terjadi adalah adanya kesetaraan budaya, sehingga antara satu entitas budaya dengan budaya lainnya tidaklah berada di dalam suasana bertanding untuk memenangkan pertarungan.⁸⁵

Sebagaimana diketahui kebudayaan adalah seperangkat pengetahuan yang dimiliki manusia yang dijadikan sebagai pedoman untuk menginterpretasikan tindakan dan dalam menghadapi lingkungannya. Setiap entitas masyarakat pastilah memiliki kebudayaan dan bisa jadi berbeda dengan lainnya. Etnis Jawa, Cina, Arab, dan sebagainya pastilah memiliki pengetahuan kebudayaan yang satu dengan lainnya sangat berbeda. Namun demikian, perbedaan pengetahuan budaya itu tentunya bukanlah menjadi penyebab tidak adanya saling memahami di antara mereka.

Dalam konteks ke-Indonesiaan, Nur Syam menegaskan bahwa tantangan multikultural di Indonesia terdiri atas empat hal: Radikalisme, etnosentrisme, *boutique multiculturalism*, dan negara. Radikalisme telah membutakan realitas keberagaman. Klaim kebenaran semakin kuat manakala identitas kesukuan memunculkan etnosentrisme. Ironinya radikalisme dan etnosentrisme masih disikapi dengan ideologi multikultur yang artifisial, hanya pada tataran *co-existence* dan belum *pro-existence*. Apalagi, negara tidak menjalankan amanat Pancasila dan UUD 1945 untuk menjunjung

⁸⁵ Nur Syam, *Tantangan....*, 79.

keadilan dan kemanusiaan. Kebijakan negara semakin lama semakin diskriminatif, tidak mempedulikan minoritas, dan menyingkirkan rasa keadilan. Berikut uraian keempat tantangan multikulturalisme di Indonesia:

1. Multikulturalisme dalam tantangan radikalisme

Agama merupakan aspek transenden yang mengajarkan tentang nilai moralitas yang tinggi untuk mengatur kehidupan umat manusia. Agama mengatur kehidupan antar manusia dalam pigura humanitas. Mementingkan manusia adalah inti dari ajaran Islam. Oleh karena itu, di dalam teks Islam secara ontologis mengajarkan tentang humanitas yang *rahmatan lil alamin*. Namun demikian, secara historis-aplikatif, perjalanan Islam juga berbenturan dengan masalah kepentingan duniawi, misalnya kepentingan politik. Carut marut ajaran agama di dalam kehidupan manusia terjadi ketika wilayah agama tersebut diintervensi oleh politik.⁸⁶

Berbagai konflik yang melibatkan masyarakat beragama, kebanyakan disebabkan oleh masalah politik dan bukan masalah keagamaan itu sendiri. Berbagai konflik sosial yang terjadi di berbagai belahan dunia, salah satunya di Lebanon antara Hizbullah dan Israel disebabkan oleh faktor politis, yaitu perebutan wilayah geografis yang kemudian menjadi wilayah religio-politik antara Islam dan Yahudi. Jadi, agama yang didalamnya sarat dengan ajaran kemanusiaan menjadi ternihilkan oleh tindakan manusia yang mengedepankan kepentingan

⁸⁶ *Ibid.*, 37.

pragmatis penguasaan satu atas lainnya. Hal ini yang sesungguhnya menjadi problem beragama ke depan di tengah semaraknya gerakan Islam yang juga cenderung ke arah “penihilan” terhadap lainnya.⁸⁷

Akhir-akhir ini ada sebuah pertarungan menarik dalam hubungan antar golongan Islam, yaitu, di satu sisi, ada tegangan ke arah lokalisasi Islam dan fundamentalisme Islam di sisi lain. Gerakan lokalisasi Islam diangkat oleh organisasi Islam seperti NU dan Muhammadiyah, sedangkan di sisi lain terdapat gerakan dengan *trend* semakin menguat, yaitu radikalisasi Islam diusung oleh gerakan-gerakan Islam fundamental, seperti HTI, FPI, MMI, dan juga PKS.⁸⁸

Mungkin belum bisa dikategorikan sebagai pertarungan dalam artian ada konflik di antara berbagai kelompok ini, namun sekurang-kurangnya sudah ada gambaran awal bahwa ada pertarungan “ideologis” yang mengarah pada pertarungan “otoritas” di antara berbagai organisasi sosial-keagamaan ini. Ada yang merasa otoritasnya mulai digerogeti dengan semakin banyaknya sumber daya yang direbut. Sementara juga ada yang merasa bukan merebut tetapi menyelamatkan masyarakat Indonesia dari jurang kesalahan pilihan di era global ini.

⁸⁷ *Ibid.*, 37-38.

⁸⁸ Nur Syam, *Tantangan...*, 123.

Mencermati kenyataan ini, tampaknya ada konflik tersembunyi (*hidden conflict*) yang jika tidak dilakukan pilihan cerdas akan bisa membawa kepada suasana chaos yang tidak mengenakan.⁸⁹

Jika ditelusuri, ada dua tipologi penjelasan. *Pertama*, adalah penjelasan radikalisme. Jika ditilik dari para pelaku pengeboman, mereka adalah kaum radikal Islam. Dinyatakan bahwa ada motif agama di dalam tindakan pengeboman tersebut, peristiwa Bali Blast, tanggal 12 Oktober 2002, adalah contoh nyata bagaimana beroperasinya sistem tindakan keagamaan yang menjadi variabel penjelasnya. Islam garis keras mengidentikkan tindakannya itu relevan dengan jihad agama. Merusak dan menghancurkan kepentingan barat adalah perintah agama.

Kedua, persoalan sosial-ekonomi-politik. Dalam kerusuhan agama di berbagai tempat, maka yang sesungguhnya menjadi cikal bakalanya adalah persoalan sosial-ekonomi-politik. Kecemburuan secara ekonomi kemudian dipadukan dengan masalah politik, yang juga dimuatimasalah keagamaan dapat menjadi penjelas kerusuhan sosial agama dimaksud.⁹⁰

Islam garis keras yang dilabeli dengan radikalisme Islam adalah sebuah konstruksi sosial. Sebagai sebuahkonstruksi sosial, maka yang disebut sebagai radikalisme juga sangat tergantung kepada siapa yang mendefinisikannya. Di dalam hal ini, konsepsi radikalisme sangat

⁸⁹ *Ibid.*, 123-124.

⁹⁰ Nur Syam, *Tantangan...*, 91.

tergantung kepada subyek yang melabelinya. Radikalisme adalah hasil labelisasi tentang gerakan-gerakan keagamaan yang memiliki ciri pembeda dengan gerakan Islam yang menjadi *meanstream* yang tujuannya adalah untuk menegakkan ajaran Islam sesuai dengan masa-masa lalu (*al-Salaf al-Shalih*). Visi misi gerakan ini adalah untuk menegakkan Islam sesuai dengan perintah Allah sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. Tujuan akhir dari gerakan ini adalah terciptanya suatu tatanan masyarakat, seperti zaman Nabi Muhammad SAW, *khulafaur rasyidin*, dan *al-Salaf al-Shalih*. Untuk melakukan perubahan banyak dilakukan dengan cara menjebol tatanan yang sudah ada dan menggantinya dengan tatanan baru sesuai dengan yang diinginkannya.⁹¹

Labelisasi inilah yang kemudian membawa implikasi lanjutan bahwa kekerasan atas nama agama menjadi absah. Padahal senyatanya, bahwa terorisme dengan terornya tetap teror bukan agama. Keduanya merupakan sesuatu yang berhubungan secara simetris. Keduanya tidak akan bertemu karena tujuan akhirnya sangat berbeda. Tujuan keselamatan tetaplah haruslah menggunakan cara dan jalan keselamatan. Tujuan keselamatan tidak bisa diperoleh melalui cara-cara yang bertentangan dengan keselamatan. Jika teror bukan cara untuk keselamatan, sudah pasti bahwa teror bukan berkaitan dengan agama.⁹²

⁹¹ Nur Syam, *Radikalisme...*, 17.

⁹² Nur Syam, *Rdikalisme...*, 20.

Radikalisme, fundamentalisme atau kekerasan agama hakikatnya adalah konstruksi sosial tentang paham dan tindakan keagamaan yang dilakukan oleh golongan Islam tertentu. Labeling ini diberikan oleh golongan lain sesuai dengan konsepsi mereka. Sementara itu, pelakunya sendiri menganggap bahwa pemahaman dan tindakan keberagamaannya memiliki kesesuaian dengan apa yang sesungguhnya dimaksudkan oleh ajaran agama yang dipeluknya.⁹³

Radikalisme atau fundamentalisme tidak muncul dari ruang hampa. Mengikuti paham kaum fakta sosial, bahwa radikalisme adalah sebuah gerakan yang terkait atau disebabkan oleh fakta lain, yaitu:⁹⁴ *pertama*, tekanan politik penguasa. Radikalisme atau fundamentalisme muncul disebabkan oleh tekanan politik penguasa terhadap keberadaannya di beberapa belahan dunia, termasuk Indonesia, fenomena radikalisme atau fundamentalisme muncul sebagai akibat otoriterisme. Dalam kasus Orde Baru, negara selalu membabat habis yang diidentifikasi sebagai gerakan radikal. Baginya, radikalisme adalah musuh nomor satu dan dijadikan sebagai *common enemy* melalui berbagai media transformasi. Radikalisme kiri dan kanan sama saja. Radikalisme kiri seperti Gerakan *New Left*, yang pernah berkembang di Indonesia di tahun 1980-an dan terus memperoleh momentum di tahun-tahun 1990-an melalui Partai

⁹³ Nur Syam, *Radikalisme dan Hubungan Agama-Agama: Rekonstruksi Tafsir Sosial Agama*, (Suarabaya : IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2005), 27.

⁹⁴ *Ibid.*, 9-12.

Rakyat Demokratik (PRD) merupakan eksponen organisasi yang dianggap sebagai musuh negara. Begitu kerasnya tekanan terhadap gerakan kiri radikal ini, maka banak tokohnya yang ditangkap, disiksa dan bahkan ada yang hilang tidak tentu rimbanya. Di era reformasi, gerakan-gerakan kiri radikal tampaknya kehilangan makna signifikansinya sehingga banyak tokohnya yang memasuki partai politik, misalnya Budiman Sujatmiko yang kemudian masuk ke dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sementara yang lain, jarang lagi didengar aktivitasnya. Pintu demokrasi yang telah dibuka oleh negara, sepertinya menutup celah perjuangan yang selama ini menjadi isu utamanya.

Orde baru juga sangat keras terhadap gerakan radikalisme kanan. Di antara yang paling menonjol adalah isu 'Komando Jihad', di pertengahan tahun 1980-an. Banyak tokoh Islam yang diidentifikasi sebagai pemimpin atau anggota Komando Jihad yang ditangkap dan ditahan. Usaha untuk memberangus gerakan-gerakan radikal Islam itupun terus berlangsung sampai periode munculnya Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di pertengahan tahun 1990-an. Jika gerakan radikal kiri berada dalam keadaan mati suri, tidak demikian halnya dengan gerakan radikalisme atau fundamentalisme Islam. Gerakan ini sepertinya justru menemukan lahan subur di era reformasi. Gerakan radikal muncul seperti cendawan di musim hujan. Di era reformasi yang mengedepankan demokratisasi dan hak asasi manusia, tampaknya tidak

menemukan ruang gerak untuk melakukan pemberangusan terstruktur dan sistematis terhadap gerakan Islam radikal atau fundamental. Tersebab oleh alasan itu, maka berbagai manuver gerakan Islam radikal atau fundamental tidak terdeteksi atau sengaja dibiarkan di dalam kiprahnya. Terjadiny berbagai kekerasan agama tidak serta merta menyebabkan penihilan terhadap organisasinya. Jika terjadi kekerasan agama, seperti peledakan, penyerangan dan sebagainya, maka cukup aktor-aktornya yang ditahan, diadili atau dihukumsesuai dengan tindakannya. Hal ini sangat berbeda dengan masa Orde Baru, yang tidak hanya penangkapan dan pemberian hukuman teradap aktornya, tetapi juga pelarangan terhadap organisasinya.

Munculnya berbagai gerakan Islam yang berkonotasi radikal akhir-akhir ini, seperti Hizbut Tahrir Indonesia, Majelis Mujahidin Indonesia, Gerakan Salafi, Laskar Jundullah, Laskar Jihad, Gerakan Islam Ahlu Sunnah wal Jama'ah dan berbagai gerakan keagamaan bercorak lokal adalah sebuah potret tentang merebaknya gerakan-gerakan keagamaandi tengah euphoria keterbukaan, demokratisasi dan hak asasi manusia.

Kedua, kegagalan rezim sekular dalam merumuskan kebijakan dan mengimplementasikannya di dalam kehidupan masyarakat. Rezim sekular di negara-negara berkembang yang kebanyakan mengadopsi sistem kapitalisme ternyata gagal dalam mengimplementasikan kebijakannya di tengah ketidakpastian ekonomi dunia. Kegagalan pembangunan yang

mengakomodasi teori-teori modernisasi, ternyata berdampak terhadap ketidakpercayaan masyarakat terhadap model pembangunan yang diadopsi dari pengalaman-pengalaman negara barat tersebut. Krisis ekonomi yang berkepanjangan di negara-negara berkembang di antaranya disebabkan oleh kesalahan di dalam penerapan teori pembangunan yang bertumpu kepada bantuan luar negeri. Dana pembangunan luar negeri yang seharusnya digunakan untuk pembiayaan pembangunan di dalam berbagai sektor ternyata juga dikorupsi. Moralitas pembangunan yang *jeblok* seperti ini kemudian mengilhami munculnya gerakan-gerakan anti korupsi, kolusi, dan nepotisme yang melanda kehidupan birokrasi dan masyarakat. Di tengah ketidakpercayaan ini, maka muncullah gagasan Islam sebagai alternatif untuk solusi. Tidak salah jika orang melirik terhadap gerakan-gerakan yang memberikan janji perbaikan, melalui solusi Islam. Ketika negara tidak lagi dapat mengatasi kemungkaran, maka tampillah mereka untuk memberantasnya. Maka, dilakukanlah gerakan-gerakan *amar ma'ruf nahi munkar* melalui cara dan mekanisme yang menurutnya absah. Tampillah di sini gerakan Islam garis keras yang melakukan tindakan menurut konstruksi sosialnya dan yang dianggapnya benar.

Ketiga, respon terhadap barat. Kebanyakan isu yang diangkat ke permukaan oleh kelompok ini adalah responnya terhadap apa pun yang datang dari barat. Isu tentang salibisme, moralitas *permissiveness*,

demokrasi dan bahkan hak asasi manusia adalah rekayasa barat untuk meminimalisasikan peran dan pengaruh Islam dalam kehidupan masyarakat. Semua ide tentang persoalan tersebut dikemas dengan konsep modernisasi dan sekularisasi. Modernisasi mempunyai anak kandung kapitalisme dan materialisme. Kapitalisme yang merupakan proses akumulasi modal didasarkan atas konsep individualisme yang dianggap bertentangan dengan konsep Islam tentang sistem masyarakat. Sedangkan materialisme yang menganggap bahwa materi adalah segala-galanya juga sangat bertentangan secara diametral dengan Islam. Apalagi sekularisasi yang bermakna pemisahan antara agama dan kehidupan dunia juga merupakan musuh Islam yang lebih menekankan kehidupan spiritual. Berbagai isme ini, mau tidak mau harus dilawan sebab akan menggerogoti kehidupan umat Islam secara umum. Ditengah ketidakmenentuan ini, muncul konsep globalisasi yang menihilkan batas geografis, budaya, sosial, dan ekonomi. Oleh karena itu, apa yang terjadi di negara-negara barat dalam waktu sangat singkat akan terjadi di belahan lain. Padahal, seperti moral *permissiveness* yang diimpor dari barat, tentunya sangat bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam keadaan banyaknya penyimpangan moral, perilaku dan tindakan-tindakan di dalam masyarakat, maka gerakan Islam ini menawarkan konsep kembali ke kehidupan masa lalu, *al-Salaf al-Shalih*. Kehidupan ini ditandai dengan pengamalan Islam secara kaffah, dalam semua tataran kehidupan. hukum

harus didasarkan atas sistem syariah, ekonomi harus berbasis syariah, politik berbasis syariah dan sebagainya.

Radikalisme atau fundamentalisme memang merupakan fenomena agama-agama. Radikalisme atau fundamentalisme tidak hanya dilabelkan kepada penganut Islam, tetapi juga penganut agama lain seperti Kristen, Yahudi, Hindu, dan Budha. Berdasarkan penelusuran historis, fenomena radikalisme merupakan gejala yang terjadi di hampir semua agama, baik yang dapat menimbulkan kekerasan agama ataupun tidak. Kekerasan di dalam agama Hindu dapat dijumpai dalam kasus kekerasan agama di India Selatan, yaitu antara kaum Sikh haluan keras dengan Islam. Di Israel juga dijumpai kekerasan agama antara kaum Yahudi Ultra dengan umat Islam. Di Jepang juga dijumpai kekerasan agama Shinto dalam bentuk penyimpangan agama yang mencederai lainnya. Demikian pula pada agama Kristen, seperti halnya yang terjadi di Amerika Serikat dan juga belahan Eropa lainnya. Di dalam Islam juga dijumpai kekerasan agama seperti terjadinya berbagai teror, baik yang langsung maupun tidak langsung mencelakai orang lain.⁹⁵

Radikalisme atau fundamentalisme selalu berurusan dengan kekerasan agama-agama. Fenomena yang dapat diamati ternyata radikalisme atau fundamentalisme berhubungan secara asimetris dengan dinamika kekerasan di dalam berbagai variasinya. Ada di antaranya dalam

⁹⁵ Nur Syam, *Radikalisme...*, 7.

coraknya yang simbolik dan ada yang bercorak aktual. Secara teoretik, kekerasan simbolik terjadi manakala di dalam suatu masyarakat terdapat kelompok yang langsung maupun tidak langsung menggunakan simbol-simbol bahasa atau wacana yang menyebabkan ketidaknyamanan dalam kehidupan bersama. Di sisi lain, kekerasan aktual terjadi manakala sekelompok lainnya melakukan sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Kekerasan dapat dilakukan oleh kelompok mayoritas maupun minoritas, tergantung pada faktor-faktor yang memicu dan menyebabkannya.⁹⁶

Hampir semua agama memang memiliki tradisi kekerasan. Namun demikian, sebagaimana yang terjadi bahwa mereka bukanlah mewakili arus utama tradisi agama-agama. Di Indonesia, arus utama agamanya adalah diwakili oleh Islam moderat melalui representasi NU, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Jam'iyah Washilah, dan sebagainya. Sedangkan yang tergolong radikal –meskipun jumlah organisasinya banyak– hanya memiliki jumlah keanggotaan yang kecil yang kebanyakan berpusat di kota-kota. Di tengah suasana kekerasan tersebut, maka stigma-stigma yang muncul adalah Islam secara afinitas elektif mendorong terjadinya kekerasan sosial.⁹⁷

Hanya saja, stigmasi ini didukung oleh sejumlah besar media massa sehingga memiliki gaung yang luar biasa. Padahal senyatanya,

⁹⁶ Nur Syam, *Radikalisme...*, 7-8.

⁹⁷ *Ibid.*, 20-21.

Islam adalah agama yang memiliki misi keselamatan dan kedamaian, menjunjung tinggi keadilan dan equalitas, mengedepankan pemberdayaan dan pengembangan masyarakat. Islam sama sekali menentang terhadap kekerasan dengan dalih mengembalikan masyarakat ke dalam ajaran agama yang benar. Islam memberikan ruang yang memadai untuk saling berbeda, bahkan terhadap terhadap keyakinan atau agama sekalipun. Sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa keselamatan, kedamaian, dan kesejahteraan adalah persoalan humanitas yang seharusnya dijujung dan diperjuangkan secara maksimal. Dengan tidak mengutamakan keselamatan, seperti kekerasan-kekerasan atas nama agama –apapun agamanya– maka sudah pasti itu bukan tindakan keagamaan yang berbasis keselamatan tersebut.⁹⁸

2. Multikulturalisme dalam tantangan etnosentrisme

Tantangan kedua multikulturalisme yang kedua adalah etnosentrisme. Etnosentrisme adalah paham yang mengagung-agungkan bangsanya sendiri dan menihilkan yang lain, dengan kata lain fanatik dengan apa yang diyakininya benar.

Wacana wawasan kebangsaan memang mengalami pasang surut. Di era orde baru, wawasan kebangsaan menjadi perbincangan di dalam berbagai penataran yang dihelat oleh negara melalui paket Penataran

⁹⁸ *Ibid.*, 21.

Penghayatan dan Pengalaman Pancasila. Namun di era reformasi perbincangan tentang wawasan kebangsaan mengalami stagnansi.

Di antara penyebabnya adalah keruntuhan orde baru yang di masa jayanya mengusung Pancasila yang ternyata gagal untuk menjadi *moral force* dalam menyelamatkan bangsa Indonesia dalam kancah pengembangan kesejahteraan masyarakat. Kegagalan itu dimaknai sebagai kegagalan negara dalam menjadikan Pancasila sebagai khazanah pengembangan negara modern berbasis kesejahteraan atau *social welfare*.

Kegundahan itu memang dirasakan oleh banyak kalangan. Makanya, diperlukan perbincangan tentang pentingnya menyegarkan kembali wawasan kebangsaan itu. Kegerahan tentang terkikisnya wawasan kebangsaan menjadi isu sentral di dalam konferensi tersebut. Ada pertanda olarisasi berbangsa yang ditandai dengan isu etnosentrisme yang berbasis etnis, ras, dan agama. Sementara itu, tantangan globalisasi sudah berada di pelupuk mata.

Sebagai bangsa yang pluralitas dan multikulturalitas yang realistis, maka mutlak diperlukan semangat kebersamaan untuk menjaga agar pluralitas dan multikulturalitas tersebut tidak terkoyak dan menjadi penyebab hilangnya kesatuan dan persatuan. Para *founding fathers* negeri ini sedari awal sudah menyadari bahwa bangsa ini terdiri dari suku, agama, dan ras yang heterogen sehingga harus ada *common platform* yang bisa mempersatukannya. Dan, yang dijadikan sebagai pemersatu itu

adalah Pancasila yang kemudian dijadikan sebagai dasarnegara dan pemersatu bangsa Indonesia. Para pendiri bangsa yang terdiri dari kaum agamawan dan nasionalis telah menyepakati bahwa hanya dengan Pancasila kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia akan terus terjadi.

Wawasan kebangsaan sesungguhnya adalah seperangkat pengetahuan, sikap, dan tindakan yang didasarkan atas kesadaran bahwa masyarakat Indonesia yang berada di dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang berwarna-warni suku, agama, etnis, tradisi, dan kebudayaanya adalah bangsa yang satu dan akan terus dipertahankan sampai kapan pun. Pengakuan akan pluralitas dan multikulturalitas ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya kebersamaan dalam menghadapi apa saja, termasuk menghadapi berbagai tantangan, ancaman, dan gangguan yang dapat mencederai kesatuan dan persatuan bangsa.

Tidak ada suatu pemerintahan yang tidak menginginkan keteraturan sosial. Makanya, eksperimen untuk mengimplementasikan pandangan hidup bangsa dan dasar negara juga menjadi agenda utama di dalam masyarakat-bangsa. Pancasila pun mengalami berbagai cara untuk diimplementasikan. Di era Orde Lama, Pancasila pun ditafsirkan menjadi Trisila, kemudian Ekasia. Dan, intinya adalah gotong royong. Sedangkan di era Orde Baru dilakukan upaya implementasi Pancasila secara radikal, yaitu keinginan menjadikannya sebagai satu-satunya asas dalam

kehidupan masyarakat. Untuk mencapai hal itu, Pancasila harus dijadikan butir-butir pedoman yang *aplicable* di dalam kehidupan bermasyarakat.

Pancasila yang diharapkan menjadi *moral force* ternyata berantakan karena banyaknya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Di saat seperti ini, maka Pancasila yang sesungguhnya merupakan ideologi kebangsaan pun terkena imbasnya. Pancasila dianggap oleh sebagian masyarakat sebagai ideologi yang sudah karatan dan tidak memiliki fungsi bagi pengentasan problem sosial kemasyarakatan.

Disinilah kemudian muncul gagasan untuk mengeliminasi Pancasila dengan ideologi lain, misalnya dengan agama. Kaun radikal yang mengusung ideologi Islam benar-benar berkeyakinan bahwa penerapan *khilafat Islamiyah* dan syariah secara *kaffah* adalah solusi tuntas masalah kemasyarakatan.

Rasanya memang kita perlu belajar ulang tentang pentingnya mengedepankan wawasan kebangsaan dengan menjadikan Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Kearifan lokal ulama-ulama terdahulu kiranya bisa dijadikan sebagai teladan bahwa pluralitas dan multikulturalitas bangsa Indonesia perlu direspons bukan dengan mengedepankan agama sebagai dasar negara, akan tetapi harus dicari format baru yang lebih bisa mengkoeksistensi berbagai perbedaan. Dan, Pancasila merupakan satu-satunya pilihan.

3. Multikulturalisme dalam tantangan *boutique multikulturalism*⁹⁹

Negara perlu menjamin kerukunan sosial masyarakatnya. Untuk kepentingan ini, maka muncullah Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, No. 9 dan 8 tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah. Untuk menjamin adanya kerukunan itu, maka dibuatlah institusi “Forum Kerukunan Umat Beragama” (FKUB). Institusi ini menjadi pengemban regulasi tentang kerukunan agama dan pendirian sarana peribadahan.

Setiap aturan dibuat sebagai pola bagi tindakan masyarakat. Maka, melalui peraturan ini, berbagai kasus yang masih mengedepan terkait dengan konflik antar umat beragama seperti di Poso, Ambon, dan lainnya, akan dapat dieliminasi. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak konflik agama yang sebenarnya berasal dari masalah kriminal biasa. Tetapi begitu dibumbui dengan *the problem of ultimate concern* dan politik, maka persoalan kriminal biasa itu akan dapat menjadi konflik agama.

Kasus Poso dan Ambon yang hingga sekarang masih belum sepenuhnya tuntas, salah satu di antaranya adalah kesadaran multikulturalisme yang masih bercorak luar atau dalam konsepsi Stanley

⁹⁹ Nur Syam, *Tantangan...*, 91-93.

Fish disebut sebagai *boutique multiculturalism*. Yaitu gejala yang ditandai oleh relasi superfisial dan kosmetis dengan obyek afektifnya. Perbedaan dirayakan dalam tema fashion, festival akhir pekan dan upacara-upacara kebersamaan. Dalam konflik beragama, perjanjian damai hanya sebuah pajangan untuk menuruti kemauan negara atau kaum elitnya. Jadi, i luar memang sepertinya sudah ada kesepahaman, namun di dalamnya masih menyimpan bara api yang jika ada faktor pemicunya, maka akan terjadi lagi konflik sosial bernuansa agama.

Dialog lintas agama memang sudah dilakukan. Kesepakatan untuk melakukan rekonsiliasi juga sudah terjadi. Perumusan kerjasama sudah diagendakan. Namun tampaknya masih sebatas upacara-upacara artifisial. Sebuah agenda besar yang belum tersentuh secara maksimal adalah meminimalisasi kecurigaan beragama. Posisi relasi antagonistik smestinya berubah menjadi posisi saling memahami. Pemahaman itu bukan dalam kerangka kesamaan teologis yang memang meniscayakan perbedaan mutlak, tetapi kesamaan humanitas yang meniscayakan adanya ruang saling bertemu.

Oleh karena itu, harmoni dan kerukunan hanya akan terjadi ketika komponen-komponen masyarakat beragama memahami arti pentingnya kebersamaan dalam humanitas melalui aksi di dalam kehidupan masyarakat yang berdasarkan *sunnatullah* memang plural dan multikultural.

4. Multikulturalisme dalam tantangan negara¹⁰⁰

Salah satu fenomena yang selalu menjadi bahan perbincangan terutama pada forum-forum Penataran P4 ialah bagaimana memposisikan Islam dalam sistem kenegaraan yang menggunakan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Tampaknya masih terdapat kerancuan pemahaman mengenai kedudukan keduanya dalam kehidupan bernegara-bangsa. Kesulitan ini berangkat dari adanya pemikiran bahwa menempatkan posisi Pancasila “melebihi” posisi Islam dianggap sebagai suatu kemusykilan secara teologis. Konsep teologis bahwa Islam sesuatu yang *kaffah* (sempurna) dan *wa la yu’la ‘alaih* (tak ada yang lebih tinggi darinya), menyebabkan adanya kesulitan menempatkan keduanya dalam posisi apakah saling berhadapan atau posisi saling mnunjang dan saling melebihi. Kesulitan tersebut berkaitan dengan cara pandang tentang hubungan agama dan negara dalam dinamika kehidupan bernegara-bangsa.

Konsep hubungan negara dan agama dalam perspektif pemikiran para ahli sekurang-kurangnya terbagi dalam tiga tipologi, yang saling berseberangan. Teoritisi yang beranggapan bahwa hubungan antara negara dan agama bersifat *integrated* agaknya tak memberikan peluang bagi ideologi kenegaraan lain selain agama itu sendiri. Paslanya, dia

¹⁰⁰ Nur Syam, *Tantangan Mult...*, 105-108

beranggapan bahwa agama adalah wahyu Tuhan yang telah mengatur segalanya, termasuk urusan kenegaraan. Model pemerintahan Iran merupakan contoh yang representatif. Sedangkan pandangan sekuler menyatakan bahwa hubungan antara negara dan agama terpisah. Hatta, negara mengurus urusan kenegaraan dalam berbagai dimensinya, sedangkan agama mengurus urusan agama saja. Keinginan pemerintah Belanda pada masa penjajahan dengan melokalisasi agama seputar persoalan di masjid atau surau merupakan penerapan gagasan sekularis. Sepertinya yang memberi peluang bagi pengembangan gagasan menempatkan keduanya dalam kehidupan bernegara-bangsa ialah pandangan teoritis bahwa negara dan agama bersifat simbiotik atau saling membutuhkan. Namun demikian di tengah arus pemikiran politik simbiotik, seperti di Indonesia, ternyata perbincangan mengenai penempatan Islam dan Pancasila dalam peta kenegaraan juga sering simpang siur.

Salah satu tantangan demokrasi adalah meningkatnya gerakan *civil society*. Yaitu meningkatnya kesadaran masyarakat tentang demokrasi, kesadaran hukum, dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tanpa tiga pilar ini maka *civil society* yang dicita-citakan sebagai bagian penting dari Orde Reformasi hanyalah isapan jempol belaka. *Civil society* bukan hanya didiskusikan panjang lebar, akan tetapi butuh tindakan praksis. Ia

bukan hanya mengawang di angkasa, tetapi harus mendarah daging atau bergelut dengan tanah dan air.

Dalam konteks keindonesiaan yang memang terdapat berbagai etnis, bahasa, dan keyakinan keagamaan di tengah multikulturalitas dan pluralitas tersebut, tentunya diperlukan aturan yang dapat dijadikan sebagai pedoman di dalam mengelola kebhinekaan yang memiliki potensi masalah.